

## IDENTIFIKASI KARAKTERISTIK PERMUKIMAN KUMUH DI KELURAHAN PONGANGAN KECAMATAN GUNUNGPATI

Abdul Jabbar<sup>1\*</sup>, Toni Hartanto<sup>1</sup>, Fathia Hanif Tiaraningrum<sup>1</sup>, Andini Sukma Pratiwi<sup>1</sup>,  
Laila Zulaiha Amalia Rahmawati<sup>1</sup>, Sevianna Danah Zulfani<sup>1</sup>, Trida Ridho Fariz<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Ilmu Lingkungan, Universitas Negeri Semarang, Jawa Tengah, Indonesia.

\*Email korespondensi: [abduljabbar@mail.unnes.ac.id](mailto:abduljabbar@mail.unnes.ac.id)

### ABSTRAK

Fenomena urbanisasi mengakibatkan tumbuhnya pemukiman padat termasuk di Kecamatan Gunungpati, Kota Semarang. Kondisi ini mendorong alih fungsi lahan yang tidak sesuai dengan peruntukannya dan mendorong terbentuknya pemukiman kumuh. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tingkat kekumuhan dan partisipasi masyarakat terhadap program pembangunan lingkungan kawasan pemukiman di daerah kumuh di Kecamatan Gunungpati dengan fokus kajian di Kelurahan Pongahan. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif dengan menggunakan analisis data deskriptif dan pengumpulan data dilakukan dengan cara survey primer melalui observasi langsung dan wawancara. Analisis menunjukkan bahwa klasifikasi tingkat kekumuhan dan partisipasi masyarakat di Kelurahan Pongahan RW 05 pada RT 03, 05, dan 08 berturut-turut adalah (1) kumuh rendah dengan tingkat partisipasi *informing*, (2) kumuh sedang dengan tingkat partisipasi *informing*, (3) kumuh tinggi dengan tingkat partisipasi *consulting*.

**Kata kunci:** Partisipasi; Pengelolaan Lingkungan; Tingkat Kekumuhan; Urbanisasi

## **PENDAHULUAN**

Salah satu masalah utama kota adalah kepadatan penduduk yang tinggi. Fenomena ini dijelaskan sebagai urbanisasi, yaitu terkonsentrasinya penduduk pada suatu daerah tertentu. Konsentrasi ini diikuti dengan konsentrasi aktivitas dan tidak meratanya kepadatan suatu daerah dengan daerah lainnya (Sato and Yamamoto, 2005). Masalah distribusi penduduk yang tidak merata di Kota Semarang mendorong pemerintah untuk mengatur pengembangan kota ke daerah dengan kepadatan rendah, salah satunya Kecamatan Gunungpati. Kebijakan ini berdampak pada tumbuhnya kawasan kumuh akibat alih fungsi lahan menjadi kawasan pemukiman. Setidaknya 19,9% kawasan pemukiman di Kecamatan Gunungpati tidak sesuai dengan lahan pemukiman yaitu memiliki tingkat kemiringan tinggi, lahan kritis, lahan untuk kawasan penyangga dan lahan untuk kawasan lindung (Arifin dkk., 2013). Pertumbuhan pemukiman di Kota Semarang yang tidak sesuai dengan fungsinya ini berpotensi memberikan dampak peningkatan kejadian banjir dan polusi udara (Ekawati dkk., 2018).

Upaya pemerintah dalam mengatasi kawasan kumuh di Kota Semarang terintegrasi dalam program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU). Program KOTAKU merupakan program Dirjen Cipta Karya untuk pengentasan kawasan kumuh di seluruh Indonesia. Program yang dilakukan untuk penurunan angka kumuh berupa perbaikan kondisi bangunan gedung, jalan lingkungan, fasilitas air minum, pengelolaan sampah, dan proteksi bencana kebakaran. Secara implementatif program ini berhasil menurunkan luas wilayah kumuh dari tahun 2015 dengan luas 415 ha menjadi 112,49 ha pada tahun 2018. Akan tetapi, sejak tahun 2019 hingga 2021 luas wilayah kumuh kembali mengalami peningkatan, sementara anggaran program pengentasan kawasan kumuh mengalami penurunan akibat pengalihan anggaran untuk penanganan covid-19. Berdasarkan SK Walikota Semarang nomor 50/275 tahun 2021, luas kawasan kumuh di Kota Semarang mencapai 431,54 ha. Selain permasalahan anggaran, tantangan terhadap program pengentasan kawasan kumuh adalah lemahnya partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan yang disebabkan oleh rendahnya sosialisasi program dari pemerintah (Christianingrum dan Djumiarti, 2019).

Kawasan kumuh di Kecamatan Gunungpati pada tahun 2021 tersebar di 3 Kelurahan yaitu Plalangan 2 RT, Sukorejo 2 RT, dan Pongahan 6 RT (SK Walikota Semarang, 2021). Kawasan tersebut masuk dalam kawasan prioritas dalam program peningkatan kualitas lingkungan pemukiman secara berkelanjutan dan penuntasan kawasan kumuh di Kota Semarang. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tingkat kekumuhan dan partisipasi masyarakat di Kecamatan Gunungpati dengan fokus kajian di Kelurahan Pongahan terhadap program pembangunan lingkungan kawasan pemukiman di daerah kumuh.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian berlokasi di Kelurahan Pongahan RT 03, RT 05 dan RT 08 RW 05 Kecamatan Gunungpati, Kota Semarang (Gambar 1). Waktu penelitian dimulai dari tanggal 24 Mei 2022. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif, yaitu data yang berbentuk angka dengan melakukan pengamatan secara langsung atau dapat berupa sebuah informasi yang dinyatakan menggunakan bilangan atau dapat berbentuk angka. Jenis data kuantitatif yang dimaksud adalah sebagai berikut:

Data Karakteristik Permukiman Kumuh, yaitu:

- a. Aspek Sarana dan Prasarana, berupa kondisi jalan dan kondisi prasarana drainase.
- b. Aspek Fisik Bangunan, berupa jarak antar bangunan dan kondisi material bangunan.
- c. Aspek Lokasi, berupa tingkat rawan bencana.



Gambar 1. Peta Lokasi Penelitian

Selanjutnya tingkat kekumuhan ditentukan berdasarkan pembobotan masing-masing karakteristik sesuai dengan metode yang dikembangkan dari Panduan Identifikasi Kawasan Permukiman Kumuh Daerah Penyangga Kota Metropolitan (Direktorat Pengembangan Permukiman Direktorat Jenderal Cipta Karya, 2006). Data Tingkat Partisipasi Masyarakat dengan pendekatan teori partisipasi oleh (Arnstein, 1969). Tingkat partisipasi masyarakat diidentifikasi berdasarkan hasil wawancara dengan pemangku kepentingan di setiap RT. Klasifikasi tingkat partisipasi ditentukan berdasarkan indikator pelibatan masyarakat yang teridentifikasi dari proses wawancara.

Metode pengumpulan data yang dilakukan pada proses identifikasi karakteristik permukiman kumuh di wilayah studi merupakan hasil survei primer melalui observasi dan wawancara. Tahap observasi yang dilakukan merupakan observasi pasif dimana peneliti langsung turun ke wilayah Kelurahan Pongangan untuk mengamati, namun peneliti tidak terlibat secara langsung dalam segala bentuk kegiatan yang dilakukan pada wilayah studi tersebut. Selain mengamati, peneliti juga mengumpulkan data berupa dokumentasi di lapangan berupa foto yang digunakan untuk melengkapi data. Sedangkan pengumpulan data melalui wawancara dilakukan terhadap Ketua RT/RW atau kepala lingkungan yang ada di permukiman tersebut terkait tentang menanyakan permasalahan yang ada.

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis deskriptif. Metode ini digunakan guna untuk menganalisis hasil wawancara dan observasi. Metode deskriptif memiliki tujuan untuk menjelaskan terkait dengan kondisi wilayah studi dengan mengacu pada suatu indikator atau variabel yang akan digunakan. Dalam penelitian ini berupaya untuk mencatat, melakukan analisa dan menggambarkan kondisi yang saat ini terjadi. Metode kuantitatif deskriptif pada penelitian ini dilakukan dengan melalui metode pembobotan atau skoring berdasarkan indikator atau variabel tingkat kekumuhan menurut Panduan Identifikasi Kawasan Permukiman Kumuh Daerah Penyangga Kota Metropolitan dan tingkat partisipasi berdasarkan indikator pelibatan partisipasi masyarakat dalam teori partisipasi oleh Arnstein (1969).

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

**Tingkat Kekumuhan**

**A. Jalan**

Kondisi jalan dari ketiga RT yang telah diamati, untuk wilayah RT 03 memiliki kondisi jalan yang baik diatas 50%, wilayah RT 05 dan RT 08 memiliki kondisi jalan yang baik < 50%.



Gambar 2. Kondisi jalan (a) RT 03; (b) RT 05; (c) RT 08.

**B. Drainase**

Kondisi drainase dari ketiga RT yang telah diamati, untuk wilayah RT 03 memiliki tingkat pelayanan sistem perpipaan > 60%, wilayah RT 05 memiliki tingkat pelayanan sistem perpipaan 30%-60%, sedangkan untuk wilayah RT 08 memiliki tingkat pelayanan sistem perpipaan < 30%.



Gambar 3. Kondisi prasarana drainase (a) RT 03; (b) RT 05; (c) RT 08.

**C. Jarak Antar Bangunan**

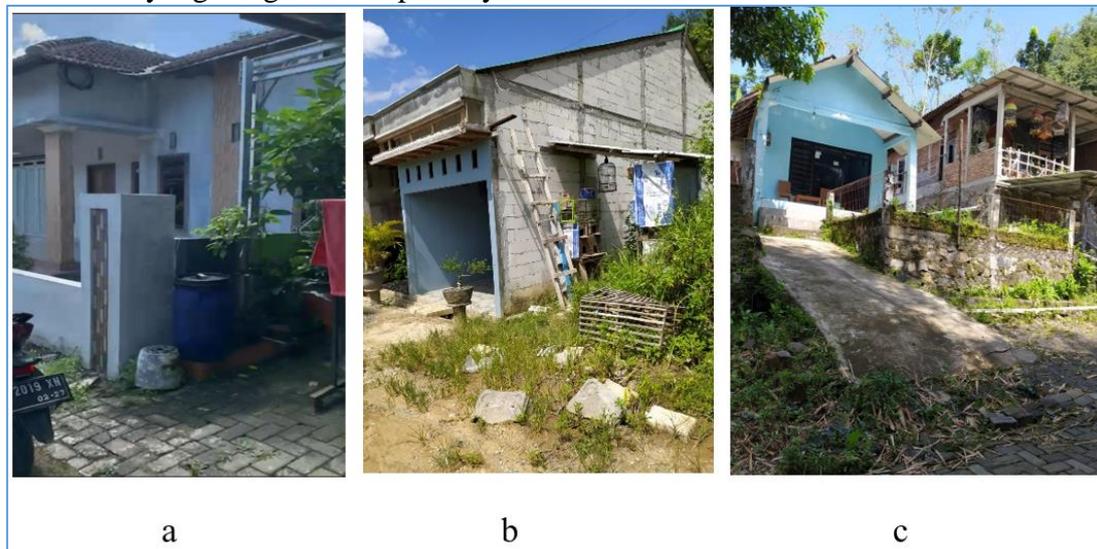
Jarak antar bangunan dari ketiga RT yang telah diamati, untuk wilayah RT 03 termasuk kawasan dengan jarak antar bangunan kurang dari 1,5 meter, sedangkan untuk wilayah RT 05 dan RT 08 termasuk kawasan dengan jarak bangunan antara 1,5 meter sampai 3 meter.



Gambar 4. Jarak antar bangunan (a) RT 03; (b) RT 05; (c) RT 08.

**D. Material Bangunan**

Kondisi material bangunan dari ketiga RT yang telah diamati, wilayah RT 05 dan RT 08 berada di kawasan yang bangunan temporernya 25% -50%, sedangkan untuk RT 03 berada di kawasan yang bangunan temporernya <50%.



Gambar 5. Kondisi material bangunan (a) RT 03; (b) RT 05; (c) RT 08.

**E. Tingkat Rawan Bencana**

Berdasarkan hasil wawancara dari masing-masing narasumber, wilayah RT 03 tergolong kawasan dengan tingkat kerawanan rendah dengan intensitas bencana kurang dari 3 kali dalam setahun, wilayah RT 05 tergolong kawasan dengan tingkat kerawanan bencana sedang dengan intensitas bencana 3-5 dalam setahun, dan wilayah RT 08 tergolong

kawasan dengan tingkat kerawanan bencana tinggi dengan intensitas bencana lebih dari 5 kali dalam setahun. Jenis bencana yang ditemukan antara lain tanah bergerak, tanah longsor, dan banjir. Wilayah RT 05 dan RT 08 menjadi wilayah yang paling rawan terkena bencana tanah bergerak dan longsor karena posisi wilayahnya yang paling ujung dengan kondisi topografi relatif curam.

Tabel 1. Tingkat Kekumuhan.

| Indikator kekumuhan        | Bobot kekumuhan |                |                |
|----------------------------|-----------------|----------------|----------------|
|                            | RT/RW<br>03/05  | RT/RW<br>05/05 | RT/RW<br>08/05 |
| Kondisi jalan              | 5               | 1              | 1              |
| Kondisi prasarana drainase | 5               | 3              | 1              |
| Jarak antar bangunan       | 1               | 3              | 3              |
| Kondisi material bangunan  | 5               | 3              | 3              |
| Tingkat rawan bencana      | 5               | 3              | 1              |
| Jumlah                     | 21              | 13             | 9              |
| Nilai                      | Tinggi          | Sedang         | Rendah         |
| <b>Tingkat kekumuhan</b>   | Rendah          | Sedang         | Tinggi         |

Berdasarkan Tabel 1, kondisi jalan dari ketiga RT yang paling baik adalah RT 03, sedangkan untuk wilayah RT 05 dan RT 08 kondisi jalannya masih kurang baik. Jarak antar bangunan di wilayah RT 05 dan RT 08 antara 1,5 meter sampai 3 meter dengan jarak per rumahnya lumayan jauh, sedangkan untuk wilayah RT 03 jarak antar bangunannya sangat dekat yaitu kurang dari 1,5 meter sehingga terlihat seperti pemukiman yang sangat padat. Kondisi material bangunan sesuai kenampakan, untuk wilayah RT 03 terlihat baik dibandingkan dengan dua RT yang lain yaitu RT 05 dan RT 08. Untuk tingkat rawan bencana paling sering terjadi di wilayah RT 08 dengan intensitas bencana lebih dari 5 (lima) kali dalam kurun waktu 5 tahun, sedangkan untuk kedua RT yang lainnya yaitu RT 03 dan RT 05 intensitas bencananya lebih rendah dibandingkan RT 08.

### Tingkat Partisipasi

Dalam kegiatan pembangunan, keterlibatan masyarakat sangatlah diperlukan, tidak hanya sebagai wujud untuk pelaksanaan demokrasi, tetapi agar hasil pembangunan yang dilakukan dapat tepat sasaran dan ideal untuk masyarakat. Adisasmita (2006) mengemukakan bahwa keterlibatan anggota masyarakat dalam suatu pembangunan yang meliputi dari kegiatan perencanaan maupun pelaksanaan suatu program pembangunan yang dikerjakan masyarakat dinamakan sebagai Partisipasi Masyarakat. Cornwall (2002) juga mengemukakan bahwa partisipasi akan memberi pengaruh dalam keputusan kebijakan sekaligus menciptakan sistem kontrol sosial menyangkut kehidupan bagi masyarakat yang bersangkutan.

Dengan adanya kemampuan dari masyarakat untuk berpartisipasi akan memudahkan bagi pemerintah dalam melaksanakan suatu program pembangunan yang akan dilaksanakan. karena dukungan dari masyarakat sebagai modal bagi pemerintah untuk menjalankan programnya. Menurut Kunarjo (2002) pelaksanaan partisipasi masyarakat dapat dilakukan dalam beberapa hal diantaranya partisipasi pada perencanaan, partisipasi pada pelaksanaan kegiatan, dan partisipasi pada evaluasi atau monitoring serta partisipasi pada penerimaan hasil.

Tingkat partisipasi masyarakat di tiga RT pada tahap pra pelaksanaan yaitu berupa keikutsertaan mereka dalam musyawarah dan ikut andil dalam menyampaikan pendapat. Musyawarah yang dilakukan ini merupakan pertemuan rutin di masing-masing RT dengan

agenda pembahasan berupa usulan-usulan pembangunan sarana dan prasarana dan keluhan masyarakat terhadap permasalahan lingkungan yang ada. Berdasarkan hasil wawancara, masyarakat dari setiap RT sebagian besar mengusulkan untuk pembangunan jalan dan drainase, terutama masyarakat dari RT 05 dan RT 06. Hal ini dikarenakan lokasi dua RT tersebut berada di paling ujung sehingga pembangunannya kurang diperhatikan oleh pemerintah.

Tabel 2. Tingkat partisipasi masyarakat

| No | RT/RW | Indikator Pelibatan Masyarakat   | Tingkat Partisipasi |
|----|-------|--|---------------------|
| 1  | 03/05 | “... musyawarah hanya terbatas diikuti oleh ketua RT, biasanya sudah ada informasi rencana pembangunan jalan yang mana yang akan dibangun, batas dan ukurannya juga sudah ditentukan. Saat pelaksanaan masyarakat di RT 3 ini tidak dilibatkan. ... tidak ada musyawarah lagi setelah selesai proses pembangunan. ...” (Ketua RT 03)   | Informing           |
| 2  | 05/05 | “... kami sudah banyak mengajukan RAB tapi hanya sedikit yang dibangun. ... biasanya ada musyawarah, tapi saat dibangun tidak sesuai keinginan kami, biasanya asal-asalan, tidak ada dasar pengerasan atau pemadatan tanahnya, hanya tanah diratakan, kemudian diberi pasir, dan langsung dipasang paving, sehingga jalan-jalannya banyak yang bergelombang ...” (Ketua RT 05) | Informing           |
| 3  | 08/05 | “... di sini rutin melakukan musyawarah, usulan yang kami ajukan sebagian besar pembangunan drainase karena merupakan kebutuhan kami di sini. ... pembangunan yang banyak dilaksanakan adalah perbaikan jalan dan drainase. ... masyarakat biasanya terlibat dalam pembangunan dalam bentuk menyiapkan konsumsi. ...” (Ketua RT 08)  | Consultation        |

Saat tahap pelaksanaan pembangunan, untuk masing-masing dari ketiga RT, warganya tidak ikut serta dalam proses pembangunan, baik itu pembangunan jalan maupun drainase. Berdasarkan dari hasil wawancara yang telah disampaikan oleh narasumber, untuk pembangunan seperti jalan dan drainase dilakukan oleh TMMD (Tentara Manunggal Masuk Desa) yang memang sudah diperintahkan dari pihak pemerintah terkait. Selain warganya yang tidak ikut serta dalam proses pembangunan, masing-masing warga di setiap ketiga RT tersebut juga tidak ikut serta dalam mengawasi pembangunan. Sedangkan dalam kegiatan kerja bakti, masyarakat dari setiap RT sebagian besar ikut serta untuk melakukan gotong royong. Berdasarkan apa yang telah disampaikan narasumber yaitu Ketua RW 05, mewajibkan setiap RT nya untuk mengirim maksimal 2 orang dari warganya untuk melakukan kerja bakti seperti bersih-bersih balai desa, taman balai desa, dan lingkungan sekitarnya pada setiap hari Minggu pagi.

Selanjutnya, pada tahap pasca pelaksanaan, ketiga RT tersebut tidak melakukan musyawarah setelah pembangunan dilakukan. Namun terkait dengan pemeliharaan hasil pembangunan, dari ketiga RT tersebut hanya RT 08 yang melakukan pemeliharaan, sedangkan untuk kedua RT yang lainnya tidak ada pemeliharaan hasil pembangunan. Berdasarkan hasil wawancara yang disampaikan oleh narasumber yaitu Ketua RT 08 mengatakan bahwa apabila hasil pembangunan seperti jalan atau drainase ada kerusakan, warganya kerja bakti untuk memperbaiki jalan atau drainase tersebut, menurut narasumber, kondisi jalan yang ada di wilayah RT 08 ini sering rusak walaupun telah diperbaiki karena wilayah RT 08 ini berada di wilayah yang tanahnya tidak stabil.

Tingkat partisipasi di wilayah Kelurahan Pongangan Kecamatan Gunungpati RW 05, untuk wilayah RT 03 dan RT 05 memiliki nilai partisipasi dengan skor berjumlah 3 dan termasuk ke dalam tingkat partisipasi *Informing* atau pemberian informasi dimana hal ini adanya peran serta masyarakat. Kedua wilayah tersebut warganya mengikuti musyawarah sebelum diadakannya pembangunan untuk menjaring informasi maupun menyuarakan pendapat.

Motivasi masyarakat jika menanggapi program/kegiatan perbaikan lingkungan sangat tinggi, hal ini dilihat dari wawancara yang dilakukan oleh masyarakat setempat. Banyak kegiatan yang berasal dari inisiatif warganya berupa partisipasi, namun sayangnya pendapat masyarakat terutama di wilayah RT 05 tidak dipertimbangkan dalam pembentukan kegiatan/program yang berasal dari pemerintah. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Arnstein (1969) bahwa tingkat partisipasi pemberian informasi hanya berlaku satu arah dimana dari pemerintah saja kepada masyarakat dan tidak ada umpan balik dari masyarakat, informasi yang dibagikan pada akhir perencanaan yang mana masyarakat hanya memiliki kesempatan yang sedikit untuk mempengaruhi perencanaan tersebut.

Sedangkan untuk wilayah RT 08 memiliki nilai partisipasi dengan jumlah skor 4 dan termasuk ke dalam tingkat partisipasi *Consultation* atau konsultasi dimana dalam hal ini warganya tidak hanya mendapatkan informasi, namun juga dilibatkan dalam memberikan pendapat mereka. Menurut hasil wawancara yang dilakukan pada Ibu Ketua RT 08, banyak kegiatan/program yang berasal dari pendapat masyarakatnya sendiri seperti perbaikan jalan ataupun perbaikan lingkungan. Masyarakat semangat dalam mengikuti program perbaikan lingkungan atau pemeliharaan pembangunan diinisiasi oleh masyarakatnya sendiri. Bentuk partisipasi yang dapat diberikan oleh masyarakat yaitu berupa ide pembangunan, perbaikan lingkungan, sumbangan makanan, dan tenaga apabila masyarakatnya sedang mengadakan kerja bakti.

### **Pengelolaan Kawasan Kumuh Berbasis Partisipasi**

Menurut Wrihatnolo dan Dwijowojoto (2006) bahwa untuk menciptakan pemukiman yang berkualitas diperlukan penataan yang terarah dan dilaksanakan secara terpadu. Keterlibatan masyarakat dalam setiap tahap pembangunan, dimulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan pemeliharaan dan pemanfaatan akan sangat membantu dalam mewujudkan tujuan dari pembangunan itu sendiri. Hal ini menunjukkan sangat penting untuk melibatkan peran aktif masyarakat dari semua kalangan untuk berpartisipasi dalam setiap proses penataan dan pengelolaan kawasan kumuh, namun juga harus dipahami dan dilandasi bahwa pelibatan masyarakat dalam pengelolaan dan penataan bukan sekedar melibatkan masyarakat agar tidak ada hambatan dalam suatu proses pengelolaan di kawasan kumuh, akan tetapi masyarakat harus mempunyai kemampuan dalam menentukan arah pengelolaan pemukiman kumuh di wilayahnya masing-masing.

Tabel 3. Profil 3 RT berdasarkan tingkat kekumuhan dan tingkat partisipasi

| RT/RW | Tingkat kekumuhan | Tingkat partisipasi |
|-------|-------------------|---------------------|
| 03/05 | Rendah            | <i>Informing</i>    |
| 05/05 | Sedang            | <i>Informing</i>    |
| 08/05 | Tinggi            | <i>Consultation</i> |

Berdasarkan hasil observasi lapangan yang dilakukan terhadap 3 RT yang berada di Kelurahan Pongangan Kecamatan Gunungpati, wilayah RT 03 termasuk memiliki tingkat kekumuhan yang rendah dengan tingkat partisipasi masyarakatnya *Informing* atau pemberian informasi. Wilayah RT 05 memiliki tingkat kekumuhan yang sedang dan tingkat partisipasi masyarakatnya yaitu *Informing*. Sedangkan wilayah RT 08 termasuk kedalam tingkat kekumuhan yang tinggi dengan tingkat partisipasi *Consultation* atau konsultasi.

Pengelolaan permukiman kumuh berbasis partisipasi, dapat berjalan apabila masyarakat ikut dalam proses pengelolaan permukiman kumuh dalam mengatasi hambatan-hambatan dalam penanganan di permukiman kumuh. Pengelolaan permukiman kumuh berbasis partisipasi masyarakat tentunya dapat diterapkan terhadap wilayah di Kelurahan Pongangan Kecamatan Gunungpati, khususnya area penelitian yang diteliti yaitu wilayah RW 05 dengan 3 RT yang telah diobservasi yaitu RT 03, RT 05, dan RT 08. Beberapa saran yang diharapkan dapat diterapkan di wilayah Kelurahan Pongangan terkhusus RT yang diteliti tersebut agar dapat mengurangi kekumuhan yang ada di wilayahnya berdasarkan tingkat kekumuhan dan tingkat partisipasinya adalah sebagai berikut:

- Wilayah RT 03 dengan tingkat kekumuhan yang rendah hanya terjadi pada nilai jarak bangunan yang rendah, lebih difokuskan pada peningkatan tingkat partisipasi masyarakatnya dengan cara meningkatkan gotong royong pada proses pembangunan dan pemeliharaan bangunannya.
- Wilayah RT 05 dengan tingkat kekumuhan yang sedang memiliki nilai kondisi jalan yang sedikit sehingga difokuskan pada perbaikan fasilitas jalannya dan meningkatkan partisipasi masyarakat dengan cara gotong-royong dalam memelihara hasil pembangunan yang telah dilakukan.
- Wilayah RT 08 dengan tingkat kekumuhan yang tinggi diantara RT yang lain, sehingga untuk pengelolaan kawasan di fokuskan pada partisipasi masyarakat pada nilai tingkat kekumuhan dengan nilai yang rendah yaitu kondisi jalan, kondisi prasarana drainase, jarak antar bangunan, dan tingkat rawan bencana dengan cara gotong royong dalam pelaksanaan pembangunan.

## KESIMPULAN

Tingkat kekumuhan pada tiga RT di Kelurahan Pongangan berdasarkan karakteristik kondisi jalan, drainase, jarak dan kondisi material bangunan, serta tingkat rawan bencana yaitu (1) kumuh rendah di RT/RW 03/05, (2) kumuh sedang di RT/RW 05/05, dan (3) kumuh tinggi di RT/RW 08/05. Tingkat partisipasi masyarakat diidentifikasi pada level *information* di RT/RW 03/05 dan 05/05 serta *consultation* di RT/RW 08/05. Perlu peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan kumuh sesuai dengan tingkat kekumuhan dan partisipasinya sehingga pembangunan yang dilakukan dapat tepat sasaran dan berkelanjutan.

## DAFTAR PUSTAKA

Adisasmita, R. (2006). *Membangun Desa Partisipatif* (cetakan pertama). Yogyakarta: Graha Ilmu.

- Arifin, M. S., Wirawan, H., & Saad, N. (2013). Gunungpati Sebagai Kawasan Penyangga Kota Semarang. *Indonesian Journal of Conservation*, 2(1), 45–50.
- Arnstein, S. R. (1969). A Ladder of Citizen Participation. *Journal of the American Planning Association*, 35(4), 216–224. <https://doi.org/10.1080/01944366908977225>
- Christianingrum, S. I., & Djumiarti, T. (2019). Implementasi Program Kota Tanpa Kumuh di Kecamatan Semarang Timur. *Journal Of Public Policy and Management Review*, 8(2), 1–19.
- Cornwall, A. (2002). Making spaces, changing places: situating participation in development. *IDS Working Paper 170*. England: Institute of Development Studies.
- Direktorat Pengembangan Pemukiman Direktorat Jenderal Cipta Karya. (2006). *Identifikasi Kawasan Pemukiman Kumuh Penyangga Kota Metropolitan*. Jakarta: Dirjen Cipta Karya
- Ekawati, J., Hardiman, G., & Pandelaki, E. E. (2018). Pertumbuhan Permukiman di Pinggiran Kota Semarang. *Temu Ilmiah Ikatan Peneliti Lingkungan Binaan Indonesia (IPLBI)* 7, Semarang: 22 Desember 2018. Halaman 27–35. <https://doi.org/10.32315/ti.7.d027>
- Kunarjo. (2002). *Perencanaan dan Pengendalian Program Pembangunan*. Jakarta: UI Press.
- Muhammad, Irwansyah. (2016). *Skenario Partisipasi Masyarakat Dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Permukiman Kumuh (Studi Kasus Kelurahan Kotalama Kota Malang)*. Tugas Akhir. Institut Teknologi Sepuluh Nopember.
- Muvidiyanti S. (2019). *Karakteristik dan Faktor Penyebab Permukiman Kumuh di Kelurahan Tanjung Mas Kota Semarang*. Skripsi. Universitas Negeri Semarang
- Sato, Y., & Yamamoto, K. (2005). Population concentration, urbanization, and demographic transition. *Journal of Urban Economics*, 58(1), 45–61. <https://doi.org/10.1016/j.jue.2005.01.004>
- Surat Keputusan Walikota Semarang No. 50/275 Tahun 2021 tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kota Semarang*. Walikota Semarang. Semarang.
- Wrihatnolo, R. R., & Dwijowijoto, R. N. (2006). *Manajemen Pembangunan Indonesia: Sebuah Pengantar dan Panduan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.